

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi (*agency theory*) merupakan teori yang muncul akibat adanya konflik kepentingan antara pihak *principal dan agent*. Teori agensi menjelaskan hubungan antara pemegang saham sebagai *principal* dengan manajemen sebagai *agent*. Dalam hal ini, *principal* mengontrak *agent* untuk mengelola sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Mulyani dan Juvenrio (2017) menyatakan bahwa hubungan agensi merupakan sebuah kontrak oleh satu atau lebih pihak yang mempekerjakan pihak lain untuk melaksanakan suatu jasa bagi kepentingan mereka yang melibatkan pelimpahan beberapa kekuasaan untuk mengambil keputusan kepada pihak lain tersebut.

Teori keagenan adalah potensi konflik kepentingan yang tercipta ketika para manajer diberi kekuasaan oleh para pemilik perusahaan untuk membuat keputusan dimana para manajer mungkin memiliki tujuan pribadi (Brigham, 2016). Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Dalam hubungannya dengan keagenan, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu biaya pengawasan (*monitoring cost*), biaya kontrak (*contracting cost*) dan validitas politis (Gantino, 2016). Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang menghadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah cenderung akan melaporkan laba bersih rendah atau dengan kata lain akan mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan manajemen (salah satunya biaya yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan di masyarakat). Dengan adanya biaya lingkungan ini maka reputasi perusahaan akan meningkat dan para investor akan tertarik untuk berinvestasi ke perusahaan sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja. Kemudian bagi investor informasi kinerja perusahaan dapat dijadikan salah satu alternatif untuk mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut (Hartono, 2016). Kepemilikan asing merupakan

proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri, atau perorangan, badan hukum, pemerintah yang bukan berasal dari Indonesia. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *Concern* terhadap peningkatan kinerja (Indarwati, 2015). Sesuai dengan teori keagenan bahwa masalah yang terjadi yang menyebabkan kinerja perusahaan menjadi turun adalah hubungan yang tidak baik antara pemegang saham dengan manajer tetapi ketika hubungan antara pemegang saham dengan manajer bisa dikendalikan maka kinerja perusahaan dapat menjadi lebih baik (Sofyan, 2019). Keagenan menyatakan adanya kepemilikan oleh perusahaan dapat mengurangi konflik agensi yang terjadi dengan pihak manajer, dengan adanya kepemilikan institusional akan menunjukkan kemampuannya untuk memonitor pihak manajemen agar dapat menjalankan perusahaan sesuai dengan visi dan misi sehingga tujuan perusahaan untuk menambah kemakmuran para pemegang saham tercapai. Hal ini mengindikasikan bahwa makin besar saham yang dimiliki oleh investor institusional akan menimbulkan usaha monitoring yang semakin efektif karena akan mengendalikan perilaku *opportunistic* yang dilakukan oleh para manajer (Maryani, 2018). Menurut Fauzia (2018), struktur agensi dapat dijelaskan melalui tingkatan yang tinggi seperti pembuat kebijakan dalam pemerintahan sampai dengan unit organisasi mikro seperti perusahaan dalam menjelaskan hubungan manajemen yang cenderung mementingkan diri sendiri. Biaya politis muncul karena konflik kepentingan antara perusahaan dan pemerintah sebagai regulator dan perpanjangan tangan masyarakat dalam mengalihkan kekayaan perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku (Savitri, 2016). Perusahaan-perusahaan besar berkemungkinan akan menghadapi biaya-biaya politik pada waktu tertentu seperti adanya persaingan luar negeri. Jika perusahaan melaporkan laba yang cukup tinggi, maka pemerintah akan menuntut pelayanan publik yang lebih tinggi dan nantinya akan berpengaruh terhadap tingkat kinerja keuangan perusahaan (Sarwinda dan Afriyenti, 2015). Dalam kondisi tersebut manajer perusahaan akan cenderung melakukan manajemen laba yang menguntungkan perusahaan untuk mengurangi biaya politis tersebut.

2.2. Biaya Lingkungan

Biaya lingkungan secara umum meliputi keseluruhan biaya internal dan eksternal dari langkah yang diambil atau harus diambil oleh perusahaan untuk mengelola dampak lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas operasi perusahaan, dalam rangka pertanggungjawaban lingkungan serta upaya untuk mematuhi aturan dan regulasi lingkungan yang berlaku serta mengoptimalkan pemakaian sumber daya yang berorientasikan dengan upaya untuk mencegah atau mengurangi barang sisa dan polusi (Praditya, 2016). Biaya lingkungan pada dasarnya berhubungan dengan biaya produk, proses, sistem atau fasilitas penting untuk pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik. Tujuan perolehan biaya adalah bagaimana cara mengurangi biaya-biaya lingkungan, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kinerja lingkungan dengan memberi perhatian pada situasi sekarang, masa yang akan datang dan biaya-biaya manajemen yang potensial (Prasetyo, 2018).

2.3. Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing adalah persentase kepemilikan saham perusahaan oleh investor asing (Ichwani, 2019). Menurut Undang-undang No.25 Tahun 2007 Pada pasal 1 angka 6, kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Menurut Syofyan (2019) Kepemilikan asing berperan untuk mengawasi manajemen dari terjadinya kegiatan *maximizing*. Investor asing cenderung akan mempengaruhi perusahaan domestik untuk berinvestasi lebih pada aktivitas penciptaan nilai (*value-creating*) yang akan berkontribusi pada kinerja perusahaan yang lebih baik di jangka panjang. Pihak asing akan lebih tertarik melakukan investasi diperusahaan yang memberikan informasi mengenai kinerja yang ada diperusahaan secara lengkap, informasi ini yang nantinya akan dijadikan acuan oleh investor asing untuk melakukan investasi (Indarwati, 2015). Semakin banyak informasi yang diberikan maka semakin besar minat investor asing untuk berinvestasi karena kinerja yang akan dihadapi telah diketahui oleh investor asing. Kepemilikan asing yang tinggi juga dapat menunjang peningkatan kinerja perusahaan dari mekanisme monitoring kinerja perusahaan dalam bentuk

monitoring terhadap pihak manajemen diperusahaan. Hal tersebut akan berimplikasi terhadap lebih tingginya pengawasan terhadap tugas dan fungsi pokok manajer pada perusahaan (Indra, 2018).

Beberapa alasan mengapa perusahaan yang memiliki kepemilikan saham asing harus memberikan pengungkapan yang lebih dibandingkan dengan yang tidak memiliki kepemilikan saham asing, yaitu: perusahaan asing mempunyai sistem informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal (operasional perusahaan) dan diindikasikan perusahaan berbasis asing memiliki permintaan pengungkapan informasi yang lebih luas dari stakeholder dan juga memiliki standar kinerja tinggi dan tata kelola perusahaan yang baik. Sehingga semakin tinggi kepemilikan asing yang ada dalam suatu perusahaan maka akan mempengaruhi kinerja perusahaan tersebut (Dewata dkk, 2018).

2.4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain (Maryani, 2018). Perusahaan dapat memperoleh manfaat dari investor institusional dalam hal sumber daya dan keterampilan, mengurangi ketidakpastian, meningkatkan legitimasi dan mencapai tujuan kolektifnya (Hartati, dkk. 2019). Menurut Ningsih (2016) bahwa semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk kepemilikan institusional maka akan mengurangi perilaku *opportunistic* manajer yang dapat mengurangi *agency cost* yang diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan. Keberadaan investor institusional dianggap mampu mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan (Indarwati, 2015).

2.5. Political Cost

Political Cost sendiri timbul dari konflik kepentingan antara perusahaan (manajer) dengan pemerintah sebagai kepanjangan tangan masyarakat yang memiliki wewenang untuk melakukan pengalihan kekayaan dari perusahaan kepada

masyarakat sesuai peraturan yang berlaku seperti *antitrust*, regulasi, subsidi pemerintah, pajak, tarif, tuntutan buruh dan sebagainya (Savitri, 2016). Perusahaan berukuran besar cenderung untuk menggunakan kebijakan akuntansi dalam menurunkan laba perusahaan daripada perusahaan kecil. Perusahaan-perusahaan besar memiliki dorongan yang lebih kuat untuk melakukan *earnings management* dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan kecil karena perusahaan besar cenderung mendapatkan pengawasan yang lebih ketat dari kalangan pemerintah dan masyarakat umum. Hal ini didukung oleh Maryani (2018) bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula perhatian yang diberikan oleh institusi pemerintahan secara politis dibandingkan dengan perusahaan kecil. Masalah yang muncul dalam perusahaan seperti masalah keuangan dan lingkungan cenderung akan menyebabkan tekanan publik dan pada akhirnya menimbulkan *political cost* bagi perusahaan. Perusahaan cenderung akan melakukan manipulasi laba dengan cara mengurangi laba yang diperoleh untuk mengurangi *political cost* yang harus ditanggung perusahaan dan diharapkan dapat meminimalisir berbagai tuntutan yang muncul dari publik. *Political Cost* dapat diukur dengan menggunakan empat indikator yaitu : (1) Ukuran Perusahaan (*Size*) (2) Resiko perusahaan (*risk*), (3) Intensitas modal (*capital intensity*), (4) Rasio konsentrasi (Watt dan Zimmerman, 1986).

2.6. Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan sendiri adalah kemampuan perusahaan dalam menjelaskan operasionalnya. Tujuan dari penilaian kinerja ialah untuk dapat memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat membedakan hasil dan tindakan sesuai yang diinginkan (Rahmawati dan Handayani, 2017). Pengukuran kinerja membantu manajer untuk melacak implementasi strategi bisnis dengan membandingkan hasil aktual dengan tujuan strategis yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dapat bersifat jangka pendek maupun jangka Panjang (Santoso, dkk. 2017). Kinerja juga merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan dimanapun,

karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengalokasikan sumber dayanya (Ningsih, 2016).

2.7. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis hubungan antara biaya lingkungan kepemilikan asing, kepemilikan institusional dengan kinerja perusahaan yang mana hasil dari penelitian-penelitian tersebut ada yang sejalan dan juga ada yang bertentangan. Berikut adalah ringkasan dari penelitian terdahulu:

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu

No	Judul, Peneliti, Tahun	Variabel Penelitian	Sampel	Hasil
1	Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan (Roa) (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016) Selviana Nugrahawati (2019)	Variabel Independen (X): Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan Variabel Dependen (Y): Kinerja Keuangan	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016	Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan sedangkan Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap perusahaan
2	Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur Penta Indarwati (2018)	Variabel Independen (X): Kepemilikan Asing, Kepemilikan Pemerintah, Kepemilikan Manajerial Kepemilikan	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.	Kepemilikan Asing, Kepemilikan Pemerintah, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan sedangkan Kepemilikan

		Institusional dan Kepemilikan Keluarga Variabel Dependen (Y): Kinerja Perusahaan		Keluarga tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
3	Pengaruh Pengungkapan Kinerja Lingkungan, Pengungkapan Kinerja Sosial Dan Biaya Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Tahun 2014-2017) Muchlis Adi Prasetyo (2018)	Variabel Independen (X): Pengungkapan Kinerja Lingkungan, Pengungkapan Kinerja Sosial dan Biaya Lingkungan Variabel Dependen (Y): Kinerja Keuangan	Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 58 perusahaan yang berasal dari sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2017	Pengungkapan kinerja lingkungan, Pengungkapan kinerja social dan Biaya lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan
4	Pengaruh Kinerja Lingkungan, Biaya Lingkungan Dan Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Ni Luh Emmy Indah Septiadi	Variabel Independen (X): Kinerja Lingkungan, Biaya Lingkungan dan Luas Pengungkapan CSR	Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam indeks SRI-KEHATI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Kinerja Lingkungan, Biaya Lingkungan, dan Luas Pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

	(2016)		(BEI) pada periode 2015-2017	
5	<p>Pengaruh Biaya Lingkungan, Kepemilikan Asing Dan <i>Political Cost</i> Terhadap Kinerja Perusahaan Pertambangan Di Indonesia</p> <p>Evada Dewata, Hadi Jauhari, Yuliana Sari Dan Eka Jumarni</p> <p>(2018)</p>	<p>Variabel Independen (X):</p> <p>Biaya Lingkungan, Kepemilikan Asing dan <i>Political Cost</i></p> <p>Variabel Dependen (Y):</p> <p>Kinerja Perusahaan</p>	<p>Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2017 Yang Berjumlah 41 Emiten</p>	<p>Biaya lingkungan, kepemilikan asing dan <i>political cost</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan</p>
6	<p>Analisis Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)</p> <p>Nursakinah Bina Rahmawati Dan Rr. Sri Handayani</p> <p>(2017)</p>	<p>Variabel Independen (X):</p> <p>Dewan Direksi</p> <p>Dewan Komisaris,</p> <p>Komite Audit,</p> <p>Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan</p> <p>Institusional,</p> <p>Kepemilikan Publik dan Kepemilikan Asing</p>	<p>Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014</p>	<p>Besaran dewan direksi (<i>BOARDSIZE</i>), Besaran komite audit (<i>COMMITTEE</i>) dan Kepemilikan publik (<i>public</i>) memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan sedangkan Independensi dewan komisaris (<i>KOMBOD</i>), Kepemilikan keluarga (<i>family</i>), Kepemilikan institusional (<i>instin</i>) dan</p>

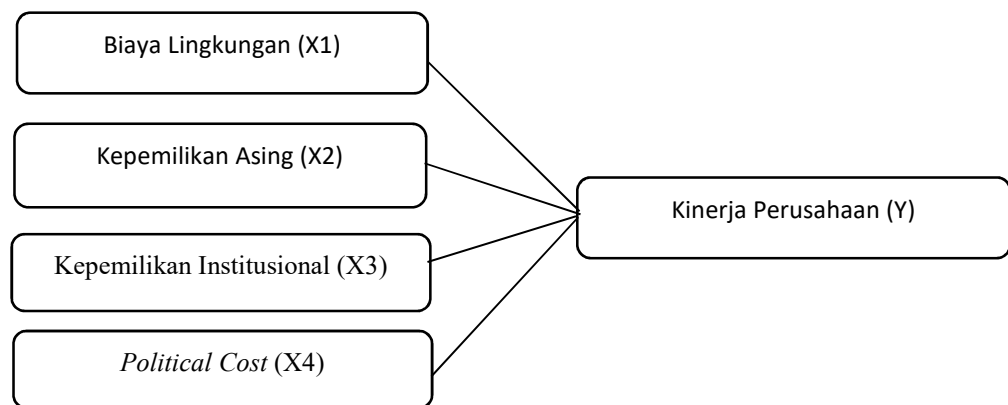
		Variabel Dependen (Y): Kinerja Perusahaan		Kepemilikan asing (<i>foreign</i>) tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.
7	Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan Biaya Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Ica Camilia (2016)	Variabel Independen (X): Kinerja Lingkungan Biaya Lingkungan Variabel Dependen (Y): Kinerja Keuangan	Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI tahun 2011-2015	Kinerja lingkungan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan sedangkan Biaya lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Sumber: Data diolah, 2020

2.8. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



H1: Biaya Lingkungan Berpengaruh Terhadap Kinerja Perusahaan

H2: Kepemilikan Asing Berpengaruh Terhadap Kinerja Perusahaan

H3: Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap Kinerja Perusahaan

H4: *Political Cost* Berpengaruh Terhadap Kinerja Perusahaan

2.9. Bangunan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Biaya Lingkungan Terhadap Kinerja Perusahaan

Biaya lingkungan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menanggung serta mencegah kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan operasional perusahaan (Adyaksa, 2018). Dana dari program biaya lingkungan ini meliputi bantuan bencana alam, pendidikan atau pelatihan, kesehatan, fasilitas umum, serta berfokus pada pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Camilia, 2016). Banyak perusahaan yang mengabaikan biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga dapat berpengaruh terhadap laporan keuangan tahunan perusahaan yang tidak terlihat (Indah, 2017). Sebenarnya jika

program biaya lingkungan ini dicantumkan dalam laporan keuangan ataupun laporan tahunan perusahaan, bisa mengangkat reputasi perusahaan, dikarenakan perusahaan yang melaporkan biaya lingkungannya maka akan berpengaruh positif terhadap keunggulan kompetitif dalam jangka Panjang sehingga kinerja yang ada diperusahaan akan terus meningkat (Camilia, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Pramitha, dkk. (2015) dan Septiadi (2016) mengungkapkan bahwa biaya lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, hal ini dikarenakan semakin luas perusahaan mengungkapkan biaya lingkungan baik berupa program bina lingkungan dan lainnya akan mampu meningkatkan reputasi perusahaan yang berpengaruh positif terhadap keunggulan kompetitif dalam jangka panjangnya. Namun berbeda dengan hasil dari penelitian yang dilakukan Prasetyo (2018) dan Camillia (2016) yang menyatakan bahwa biaya lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H1: Biaya Lingkungan Berpengaruh Terhadap Kinerja Perusahaan

2.9.2. Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Kinerja Perusahaan

Kepemilikan asing adalah saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta yang berstatus luar negeri, atau perorangan, badan hukum, pemerintah yang bukan dari Indonesia (Ningsih, 2016). Menurut Syofyan (2019) Kepemilikan asing berperan untuk mengawasi manajemen dari terjadinya kegiatan *maximizing*. Investor asing cenderung akan mempengaruhi perusahaan domestik untuk berinvestasi lebih pada aktivitas penciptaan nilai (*value-creating*) yang akan berkontribusi pada kinerja perusahaan yang lebih baik di jangka panjang. Semakin banyak informasi yang diberikan maka semakin besar minat investor asing untuk berinvestasi karena kinerja yang akan dihadapi telah diketahui oleh investor asing. Kepemilikan asing yang tinggi juga dapat menunjang peningkatan kinerja perusahaan dari mekanisme monitoring kinerja perusahaan dalam bentuk monitoring terhadap pihak manajemen diperusahaan. Hal tersebut akan

berimplikasi terhadap lebih tingginya pengawasan terhadap tugas dan fungsi pokok manajer pada perusahaan (Indra, 2018).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Handayani (2017) dan Selviana (2019) menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, dikarenakan kepemilikan asing merupakan bukan satu-satunya kepemilikan yang dapat mengerakan harga saham secara signifikan. Besar dan kecilnya jumlah kepemilikan asing yang dimiliki oleh perusahaan belum tentu akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Indra (2018), Ningsih (2018) dan Indarwati (2018) menyatakan bahwa ada pengaruh kepemilikan asing terhadap kinerja perusahaan. Hal ini terjadi karena pihak asing yang menanamkan modal sahamnya memiliki sistem manajemen, keahlian dan informasi yang cukup baik. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H2: Kepemilikan Asing Berpengaruh Terhadap Kinerja Perusahaan

2.9.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan

Kepemilikan institusional adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain (Maryani, 2018). Kepemilikan institusional yang tinggi maka akan mempengaruhi usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional maka akan dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Hal tersebut dilakukan untuk memperkecil adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen, sehingga akan menyelaraskan kepentingan manajemen dan para *stakeholder* lainnya untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Ningsih, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Indarwati (2015) dan Ningsih (2016) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan, sehingga perilaku *opportunistic* yang mementingkan diri sendiri akan berkurang. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugrahawati (2019) dan Aina (2016) yang menyatakan bahwa

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H3: Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap Kinerja Perusahaan

2.9.4. Pengaruh *Political Cost* Terhadap Kinerja Perusahaan

Political Cost merupakan semua biaya (transfer kekayaan) yang wajib ditanggung oleh perusahaan terkait adanya tindakan politik seperti pajak, regulasi, subsidi pemerintah, tarif, antitrust, tuntutan buruh dan lain sebagainya (Sarwinda dan Afriyenti, 2015). Perusahaan berukuran besar cenderung untuk menggunakan kebijakan akuntansi dalam menurunkan laba perusahaan daripada perusahaan kecil. Perusahaan-perusahaan besar memiliki dorongan yang lebih kuat untuk melakukan *earnings management* dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan kecil karena perusahaan besar cenderung mendapatkan pengawasan yang lebih ketat dari kalangan pemerintah dan masyarakat umum. Hal ini didukung oleh Maryani (2018) bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula perhatian yang diberikan oleh institusi pemerintahan secara politis dibandingkan dengan perusahaan kecil. Masalah yang muncul dalam perusahaan seperti masalah keuangan dan lingkungan cenderung akan menyebabkan tekanan publik dan pada akhirnya menimbulkan *political cost* bagi perusahaan. Perusahaan cenderung akan melakukan manipulasi laba dengan cara mengurangi laba yang diperoleh untuk mengurangi *political cost* yang harus ditanggung perusahaan dan diharapkan dapat meminimalisir berbagai tuntutan yang muncul dari publik.

Hal ini dikarenakan bahwa besar kecilnya asset yang dimiliki perusahaan akan menjadi pertimbangan satu-satunya bagi manajemen dalam mengambil keputusan, dan besarnya asset yang dimiliki perusahaan menjamin menghasilkan kinerja yang baik. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H4: *Political Cost* Berpengaruh Terhadap Kinerja Perusahaan.